

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Upaya peningkatan hasil-hasil pembangunan harus terus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang lebih terpadu dan terarah agar seluruh sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Hal pokok yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang. Untuk itu diperlukan sebuah pemikiran tentang penataan ruang yang komprehensif, yang kepentingannya tidak dilihat secara terpisah menurut daerah atau sektoral, serta mampu membaca peluang, mengintegrasikan, dan mengakomodasikan seluruh perkembangan yang terjadi.

Di dalam perkembangannya Indonesia sedang menyiapkan diri untuk menciptakan kembali stabilitas ekonomi dan politik, karena diakibatkan oleh terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, dan ini juga dialami oleh negara-negara di Asia. Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan baru dari perkembangan dunia yang terus mengglobal dan persaingan antar negara yang kian menajam. Dimana munculnya blok-blok baru dalam bidang ekonomi dan liberalisasi perdagangan. Pada tahun 1994 dibentuknya sebuah forum kerjasama ekonomi antara Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Philipina. Yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan perdagangan dalam menghadapi era globalisasi. Didalam forum tersebut lebih diutamakan daerah-daerah yang memiliki potensi

sumber daya alam yang cukup besar dan yang berbatasan dengan negara-negara yang ikut dalam forum kerjasama tersebut.

Proses globalisasi yang membuka peluang bagi daerah untuk terlibat secara langsung dalam transaksi dunia, namun sekaligus memperkenalkan persyaratan dan standar-standar baru yang berlaku secara internasional. Proses ini mendorong setiap pelaku untuk berkompetisi dan meningkatkan produktifitasnya.

Didalam forum kerjasama *Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philipina East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA), Kalimantan Timur merupakan salah satu dari 12 propinsi di Indonesia yang ikut terlibat dalam forum kerjasama tersebut. Keikutsertaan propinsi Kalimantan Timur dalam Forum BIMP-EAGA didasari atas SK Gubernur No. 510/SK.206/1995, karena secara geografis berdekatan atau berbatasan langsung dengan Malaysia serta memiliki cukup banyak sumber daya alam yang dapat diolah dari propinsi lain, serta Kalimantan Timur merupakan daratan terluas dari negara lainnya.

Dari sinilah penulis tertarik mengambil judul yang berhubungan langsung dengan Kalimantan Timur dalam kerjasama tersebut, dimana Kalimantan Timur diharapkan dapat dijadikan contoh bagi propinsi-propinsi lainnya terutama yang ikut dalam forum kerjasama BIMP-EAGA.

## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan agar penulis maupun pembaca yang lainnya mengetahui tentang :

1. Forum Kerjasama BIMP-EAGA (*Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia*

2. Peluang dan Tantangan Propinsi Kalimantan Timur dalam menghadapi kerjasama ekonomi regional BIMP – EAGA.
3. Dampak adanya kerja sama ekonomi sub regional BIMP – EAGA.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia dewasa ini memperlihatkan adanya saling ketergantungan antar bangsa di berbagai lapangan kehidupan. Hal ini disebabkan karena adanya usaha manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, ketergantungan ini menampakkan adanya proses interaksi yang saling membutuhkan antara suatu negara dengan negara lainnya yang saling menguntungkan dan saling berkepentingan satu sama lainnya.

“Interdependensi” bidang ekonomi adalah salah satu dari kondisi dasar kehidupan internasional. Tidak satupun negara dewasa ini secara ekonomi dapat berdiri sendiri dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Kerjasama dalam pembangunan ekonomi dewasa ini merupakan tujuan utama setiap negara, karena setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya, kemampuan administrasi dan keterampilan teknik.

Hubungan internasional dalam pembangunan ekonomi, dan politik luar negeri. Menurut Tryve Mathisen, Hubungan Internasional memiliki arti yaitu

*“All International aspects of human social life : that is the term designates all human behavior which originates on one side of a state boundary and effect human behavior on the other side of that boundary”*.<sup>1</sup>

---

1. M. Mathisen, *Hubungan Internasional*, Widyadarmas, Departemen Hubungan Internasional, 1970.

(semua aspek internasional dari segala aspek kehidupan sosial manusia, yang terjadi atau berasal dari negara dan dapat mempengaruhi manusia di negara lain).

Sedangkan menurut K.J Holsti : "... istilah hubungan internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses politik antar bangsa, tetapi dengan lebih memperhatikan seluruh segi hubungan itu. Hubungan internasional juga mencakup studi-studi perusahaan dagang internasional (MNC), palang merah internasional, turisme, perdagangan internasional ..."<sup>2</sup>

Dalam melakukan interaksi dengan negara lain, maka negara tersebut akan berusaha mencapai tujuan nasionalnya atau hal tersebut akan merupakan pelaksanaan dari suatu politik luar negeri. Politik luar negeri mempelajari tentang kebijakan yang diambil oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain atau masyarakat internasional yang mengacu kepada kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri berkaitan dengan proses pengambilan keputusan untuk mengikuti serangkaian tindakan khusus.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri adalah :

Strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> K.J. Holsti, *Politik Internasional : Kerangka Analisa*, pedoman ilmu Jaya, Jakarta, 1987, hlm. 29.

<sup>3</sup> Jack C. Plano, Roy Olton, *Kerangka Hubungan Internasional* teri Drs. Wawan Luanda, Jakarta

Dengan demikian terdapat interaksi atau kerjasama antar negara, yang berarti bahwa untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan domestik, negara-negara harus berinteraksi dengan negara-negara lainnya.

Propinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan hampir satu setengah kali luas pulau Jawa dan Madura. Luas wilayah tersebut menimbulkan tantangan dalam distribusi penduduk. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah perkotaan, sementara sisanya tersebar di daerah pedesaan.

Dengan luas daerah yang sangat besar didukung oleh potensi sumber daya alam yang berlimpah. Propinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi yang sangat besar. Kekayaan sumber daya alam propinsi ini, apabila diolah dengan baik, dapat mendukung tidak hanya pengembangan propinsi Kalimantan Timur akan tetapi juga dapat membantu pengembangan Indonesia secara keseluruhan.

Penduduk Kalimantan Timur sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Walaupun proporsinya cenderung menurun, sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Selain pertanian, perdagangan, jasa dan industri merupakan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja cukup besar.

Perubahan kondisi perekonomian secara nasional, regional, maupun lokal mendorong komplementaritas orientasi pembangunan menuju laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus juga menumbuhkan ekonomi pada skala masyarakat lokal. Pada skala nasional telah dilangsungkan pembaharuan dalam kebijaksanaan pembangunan daerah yaitu perkuatan menuju otonomi daerah pada

tingkat Daerah Kabupaten atau Kota. Sebagai salah satu konsekuensi otonomi daerah, setiap Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengembangkan potensi masing-masing.

Bagi Propinsi Kalimantan Timur yang memiliki kekayaan alam sangat besar, kebijakan pembangunan memberikan indikasi diperlukannya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana sesuai dengan kesepakatan dunia melalui hukum dan peraturan yang ada. Apalagi dengan terjadinya reformasi di Indonesia dimana terjadi perubahan yang begitu besar pada sistem pemerintahan di Indonesia, yang akan memberikan peluang kepada Kalimantan Timur untuk secara langsung bekerja sama dengan pihak luar atau pihak asing untuk menanamkan investasi di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan tidak menutup kemungkinan juga pada daerah yang kurang memiliki sumber daya alam. Propinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya energi terbesar, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara dan air. Dimana dari batu bara saja Kalimantan Timur memiliki 900 juta ton.<sup>4</sup> Sedangkan hutan hujan tropisnya Kalimantan Timur merupakan yang terbesar dari propinsi lainnya.

Sistem transportasi wilayah merupakan unsur utama yang berfungsi sebagai penghubung antar bagian wilayah. Sistem transportasi propinsi Kalimantan Timur terdiri dari sistem transportasi darat, laut, dan udara. Tidak seluruh wilayah Kalimantan Timur dapat dilayani oleh angkutan darat, khususnya jalan raya. Oleh karenanya angkutan sungai, laut, dan udara menjadi bagian penting dalam menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, terutama yang

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Propinsi Kalimantan Timur dan 1770. Berdasarkan Data Wilayah Propinsi

tidak terjangkau oleh prasarana jalan. Terciptanya penyelenggaraan transportasi yang efektif, yang memiliki kapasitas yang mencukupi, terpadu, tertib dan teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat, aman, nyaman, biaya terjangkau, dan efisiensi dalam pembebanan biaya publik serta utilitas yang tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional yang ditujukan untuk mengintegrasikan pola distribusi nasional dan pergerakan perdagangan internasional, sejalan dengan kerjasama regional, seperti BIMP-EAGA.

BIMP-EAGA adalah kerjasama ekonomi sub regional yang melibatkan propinsi yang terletak di empat negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Philipina yang memiliki kedekatan lokasi dan komplementaritas sumber daya. Dilandasi oleh kesepakatan KTT ke empat ASEAN di Singapura, 27-28 Januari 1992 dan *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* untuk meningkatkan efektifitas kerjasama ASEAN menjelang diberlakukannya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan perdagangan bebas dunia, serta dilatar belakangi dari suksesnya area pertumbuhan di beberapa Negara Asia.

Adapun propinsi masing-masing negara yaitu dari Indonesia terdapat 12 propinsi yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya. Dari Malaysia ada 3 negara bagian yaitu Sabah, Serawak dan Labuan. Dari Philipina terdapat 2 propinsi yaitu; Mindanao dan Palawan. Dalam kerjasama tersebut, keempat negara memiliki kesepakatan mengenai pembangunan ekonomi yang bersifat komplementar berbasis potensi masing-masing. BIMP EAGA merupakan

inisiatif *ASEAN Development Bank* (ADB) dan *International University of Japan* dalam workshop segitiga pertumbuhan pada tahun 1993.<sup>5</sup> Indonesia salah satunya diwakili oleh propinsi Kalimantan Timur sebagai bagian wilayah BIMP-EAGA yang merupakan wilayah daratan terluas dibanding wilayah negara lainnya. Selain terluas, Kalimantan Timur juga mencatat kekayaan sumber daya alam terbesar.

Setelah pembentukan forum tersebut, produksi energi Kalimantan Timur makin meningkat dengan makin mudahnya investasi yang masuk meskipun dari tahun 1994 sampai 1997, investasi yang masuk masih dibatasi. Produksi energi Kalimantan Timur pada produksi batubara di tahun 1994 hanya mencapai 12,2 juta ton dan diproduksi gas alam hanya 590 BSCF ini terus terjadi sampai tahun 1998 dimana hanya ada sedikit peningkatan dan di tahun 2001 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dimana produksi batubara mencapai 46,12 juta ton dan diikuti peningkatan pada gas alam yang mencapai 1,525 BSCF.<sup>6</sup> Serta ditahun-tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan meskipun terlihat sedikit penurunan pada batubara di tahun 2003.

Mempertimbangkan berbagai potensi dan kendala pembangunan ekonomi dalam wilayah BIMP-EAGA, propinsi Kalimantan Timur berpeluang menjadi bagian wilayah paling berkembang. Potensi sumber daya alam, posisi geografis, serta luas wilayah menjadikan wilayah Kalimantan Timur memiliki terbesar bagi perkembangan ekonomi, sekaligus penyangga ekosistem dunia. Dengan demikian, diharapkan Kalimantan Timur dapat menjadi daerah percontohan atau referensi

---

<sup>5</sup> ... ..



bagi propinsi-propinsi lainnya untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing.

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi secara umum disebabkan peningkatan produksi dari sektor-sektor dominan, terutama pertambangan minyak dan gas bumi. Kegiatan ekspor propinsi Kalimantan Timur selama tahun 1999-2001 memperlihatkan perkembangan yang positif setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi, dimana pada tahun 1999 sebesar 5.337 juta US\$ menjadi 8.861 juta US\$ pada tahun 2001.<sup>7</sup> serta di tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan. Sektor migas yang merupakan penyumbang devisa utama bagi propinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun dalam proporsi, sebaliknya sektor non migas cenderung mengalami penurunan.

#### **D. Perumusan Masalah**

Seperti yang telah penulis paparkan diatas dalam uraian latar belakang masalah, maka penulis akan mencoba mengkaji permasalahan sebagai berikut :  
Seberapa besar peluang dan tantangan Kalimantan Timur dalam kerja sama ekonomi regional BIMP – EAGA dalam peningkatan investasi di propinsi tersebut?

---

<sup>7</sup> *Statistik Perdagangan Internasional*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2002, hal. 104

## **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk dapat menjawab serta menguraikan persoalan yang saya angkat, maka, saya akan menggunakan teori dan konsep yang dapat menganalisa persoalan tersebut. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan arti kata dari teori. Menurut Mochtar Mas'ood, teori berasal dari bahasa Yunani yang artinya melihat atau memperhatikan. Jadi teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Adapun konsep adalah sebuah kata yang melambangkan sebuah gagasan.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mencoba menggunakan teori dan konsep yang lebih komprehensif. Dengan melihat adanya penanaman modal asing atau investasi dan hubungan internasional maka penulis akan mencoba menggunakan konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau, Plano dan Olton, dan teori transnasional. Dimana konsep dan teori ini dianggap lebih dapat menjelaskan permasalahan yang nantinya akan diangkat dalam skripsi ini.

### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik Internasional suatu negara. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian bisa diciptakan mulai teknik-teknik paksaan atau kerjasama.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> ... ..

Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai politik luar negeri. Plano dan Olton juga memberikan pendapat mengenai kepentingan nasional, yaitu merupakan tujuan mendasar serta faktor yang saling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.<sup>9</sup> Definisi Plano dan Olton tersebut memiliki persamaan substansi dengan pendapat Charles O Lerche dan Abdul A. Said menyatakan kepentingan nasional memiliki sasaran sebagai berikut :

*“.....self preservation (of the collective entity of the state and its human and territorial manifestation), security, well-being prestige, power, the promotion and/or protection of ideology or any other as defined, synthesized and given form by the decision makers of the country is considered as the general, long term, and continuing purpose which the state, the nation, and the government all see themselves as serving”.*<sup>10</sup>

Dari defnisi-definisi diatas, pada dasarnya masing-masing negara bersaing untuk memperoleh kepentingan nasionalnya dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melakukan kerjasama dengan negara lain yang memiliki

---

<sup>9</sup> Jack C Plano, Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Terj. Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd, England, 1982, p.7.

<sup>10</sup> Charles O Lerche J.R, Abdul A Said, *Concept of International Politics*, Prentice Hall, New Jersey Inc, Englewood Cliffs, 1963, p.9-12.

tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara agar tujuan nasional dapat tercapai. Termasuk yang dilakukan oleh Kalimantan Timur sebagai bagian dari negara Indonesia, melakukan kerjasama di dalam Forum BIMP-EAGA dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dari adanya investasi-investasi yang masuk sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan pendapatan negara.

## 2. Teori Transnasional dalam Hubungan Kerjasama

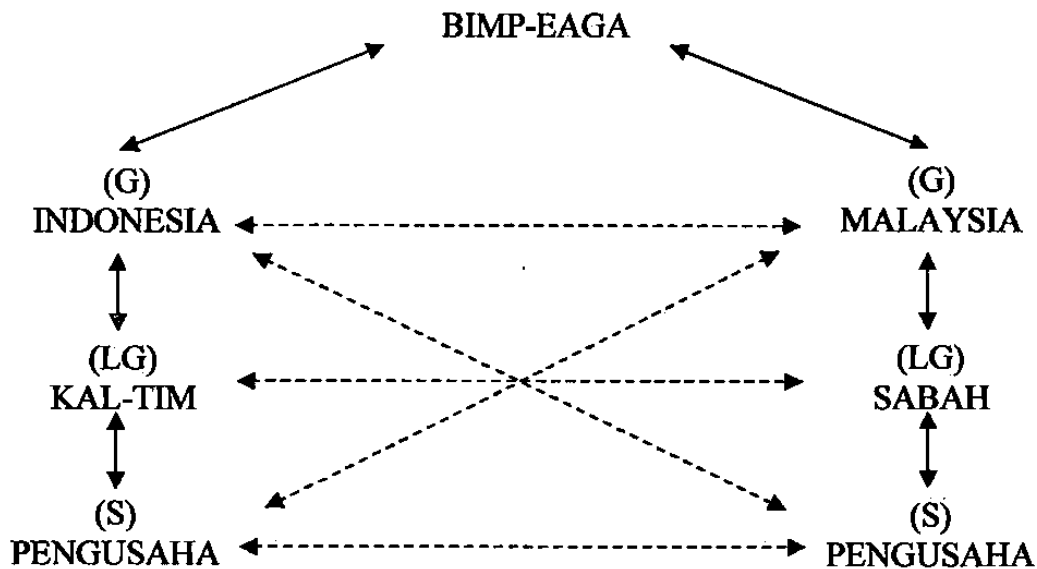
Salah satu dalam hubungan transnasional dilihat dari adanya berbagai jenis interaksi yang memberikan kebebasan kepada pemerintah negara-negara yang secara langsung dapat mempengaruhi lingkungan dalam negara pemerintahan nasional tersebut. Didalam model transnasional ini, aktor-aktor non negara itu jauh lebih penting daripada penyelenggara negara.

Aktor-aktor negara itu bisa berwujud sebagai kelompok-kelompok etnis dalam sebuah negara atau didalam sebuah kelompok kepentingan dan juga perusahaan-perusahaan multinasional. Bahkan seringkali aktor-aktor tersebut merupakan bagian dari birokrasi dalam pemerintahan suatu negara, dan ini digambarkan oleh Sidik Jadmika didalam pola hubungan internasional yang bersifat transnasional “hal mana *Local Government* merupakan aktor pelaku baru dalam hubungan internasional.”<sup>11</sup>

---

11. Sidik Jadmika, *Manajemen Daerah Berdasarkan Hubungan Internasional*, Dimef Publishing

Skema Gambar 1. Pola Hubungan Internasional Yang Bersifat Transnasional Menurut Sidik Jatmika



Pola hubungan lama atau klasik

- Hubungan dalam negeri
- - - - - Hubungan internasional

G = Government = Pemerintah Pusat

LG= Local Government

S = Society = Masyarakat atau masyarakat bisnis

Skema diatas dapat dijelaskan hubungan antara satu negara dengan negara lainnya atau lebih, dalam melakukan hubungan kerjasama Pemerintah daerah berkonsultasi dengan pemerintah pusat atau Kalimantan timur terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk meminta investasi dari negara BIMP-EAGA misalnya Malaysia, tetapi terlebih dahulu karena sudah ada pembahasan antar pemerintah daerah seperti



ditetapkan oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam kerjasama BIMP-EAGA tersebut. Sehingga dapat mengundang investor asing untuk menanamkan modal terutama investor-investor dari negara-negara anggota BIMP-EAGA yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

Kebijakan, sikap, atau tindakan negara merupakan output politik luar negeri, output tersebut merupakan tindakan atau pemikiran yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk menanggulangi permasalahan atau untuk mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional.<sup>13</sup> Menurut Firtz Gerald (1978), investasi adalah

“aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber untuk pengadaan barang, dari modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.”

Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai pendukung teori transnasional berkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi modal asing. Diantaranya, teori dari Alan M. Rugman yang menyatakan ada dua faktor terpenting yang dapat mempengaruhi modal asing, yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi.<sup>14</sup>

Variabel lingkungan lebih dikenal dengan istilah keunggulan spesifikasi negara dimana terdapat tiga unsur yang membangun variabel lingkungan, yaitu ekonomi, non ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi meliputi input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga

---

<sup>13</sup> K.J Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, 1987, hlm. 131.

kerja dan sumber daya alam. Sedangkan variabel non ekonomi merupakan variabel yang memotivasi masuknya investasi asing dikarenakan oleh kondisi politik, budaya dan sosial di suatu negara.

Variabel internalisasi memiliki keunggulan spesifik perusahaan atau penanaman modal. Dimana para investor memiliki karakteristik tersendiri yang tetap memiliki tujuan untuk dapat memaksimalkan keuntungan. Karakteristik tersebut antara lain struktur dan ketrampilan manajemen, teknik pemasaran, riset dan pengembangan.

Disini kapabilitas sebuah negara untuk dapat mempengaruhi negara lainnya agar kesepakatan kerjasama dapat tercapai, sebuah negara dituntut memiliki kemampuan diplomasi dengan berbagai cara diantaranya dengan kerjasama tersebut. Adapun pengertian kapabilitas menurut Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe :

“Sebagai atribut-atribut negara bangsa (atau actor-aktor politik lainnya) yang nyata terlihat (*tangible*) dan yang tidak nyata terlihat (*intangible*) yang membuat para aktor tadi mampu menjalankan berbagai tingkat power dalam hubungannya dengan actor-aktor lainnya.”<sup>15</sup>

Variasi alat politik luar negeri yang dimiliki suatu negara untuk mempengaruhi negara lain merupakan bagian dari fungsi kuantitas kapabilitas.

Politik suatu negara selalu merupakan pencerminan dari prioritas relative akan sasaran-sasaran dan kepentingan-kepentingan yang telah

---

<sup>15</sup> Coulombis, Theodore A. dan James H. Wolfe, *International Relations: A Systemic Approach*, 1980, hlm.



ditetapkan oleh pemerintahannya. Sebagai interaksi antara negara dalam sistem internasional yang kontemporer dan sangat beragam. Hubungan politik luar negeri antara negara yang memiliki kepentingan yang sama lebih bersifat hubungan yang harmonis, dominan-ketergantungan (*dependency*), atau juga dapat menyebabkan konflik.

#### **F. Hipotesis**

Berdasarkan penjelasan diatas, baik pada perumusan masalah maupun kerangka pemikiran yang dipandang dapat digunakan untuk menganalisa masalah yang ada, maka penulis mengambil hipotesa atau kesimpulan sementara.

Keterlibatan Kalimantan Timur dalam forum kerjasama ekonomi BIMP-EAGA, akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Kalimantan Timur secara khusus dan Indonesia secara umumnya. Dalam kerjasama ini, Kalimantan Timur akan berpeluang besar untuk menjadi wilayah yang paling berkembang dan berpotensi terbesar bagi perkembangan ekonomi, Ini dilihat dari potensi sumber daya alam yang cukup banyak. Dalam pengolahan atau produksi sumber daya alam tersebut, Kalimantan timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang masalah, dimana produksi batubara mengalami peningkatan di tahun 2001 mencapai 46,12 juta ton dari tahun-tahun sebelumnya dan sedikit menurun di tahun 2003.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Statistik Kalimantan* (Kaltimur) Kalimantan bekerjasama dengan ITR, Denpasar dan Bureng Wilayah Denpasar

Dalam mencapai peluang tersebut, Kalimantan Timur juga di dukung oleh masuknya investasi yang berasal dari negara-negara anggota BIMP-EAGA. Disini terlihat adanya minat negara-negara anggota atau investor terhadap potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Timur yang belum banyak diolah secara optimal. Selain itu peluang akan menjadi wilayah paling berkembang terlihat jelas pada peningkatan komoditas ekspor Kalimantan Timur terutama dalam hal migas.

Untuk menjadi wilayah yang paling berkembang dalam ekonominya, terutama dengan adanya forum kerjasama ini, Kalimantan Timur akan menemui sebuah tantangan terutama dalam dua hal yaitu, dari swasta atau pengusaha dan pemerintah pusat dalam hal birokrasi perizinan dan wewenang pemerintah daerah. Pihak swasta atau pengusaha kurang dilibatkan dalam forum kerjasama tersebut, sehingga banyak yang tidak tahu mengenai forum tersebut serta proyek investasi lebih atas inisiatif pemerintah. Sedangkan tantangan kedua yaitu pemerintah, dalam hal ini proses perizinan memakan waktu yang cukup lama dan wewenang pemerintah daerah terhadap forum kerjasama ekonomi BIMP-EAGA sangat terbatas.

Maka, Walaupun Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah tetapi untuk dapat mencapai tujuan tersebut harus didukung oleh pemerintah maupun swasta. Apabila salah satu pihak tersebut kurang mendukung maka pencapaian tujuan itu sulit atau bahkan tidak akan terwujud. Serta dengan adanya kerjasama tersebut di harapkan sumber daya alam yang belum diolah dapat diolah dengan adanya bantuan dana atau investasi

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif dengan menjelaskan secara objektif, fakta, dan dari data-data sekunder serta memberi penjelasan berdasarkan teori dan fakta serta wawancara langsung dengan pihak yang berwenang yang dijadikan dasar analisis, kemudian menginterpretasikannya sehingga sampai pada kesimpulan.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan didalam penulisan skripsi ini, maka penulis mencari dan mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan rumusan masalah melalui studi pustaka dari berbagai sumber tertulis seperti buku, internet, surat kabar, maupun yang lainnya.

## **I. Jangkauan Penelitian**

Agar sesuai dengan tema, judul, dan permasalahan yang ada dalam pembahasan skripsi ini, serta agar tidak keluar dari jalurnya, maka difokuskan pada hubungan kerjasama ekonomi regional BIMP-EAGA di Kalimantan Timur dari tahun 1999-2004, dengan pertimbangan makin besarnya investasi yang masuk dari pada periode sebelumnya dan lebih di sosialisasikan kepada pihak pengusaha. Tetapi penulis juga akan mengulas periode sebelum tahun 1999 untuk

## **J. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini dapat memudahkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan didalam pembahasan nanti, maka penulis akan membagi tulisan skripsi ini menjadi lima bab. Secara ringkas sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

**BAB I** : berisi pendahuluan yang membahas tentang alasan pemilihan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian dan yang terakhir penjabaran mengenai sistematika penulisan.

**BAB II** : memaparkan tentang pembentukan forum kerjasama sub regional (KESR), sejarah terbentuknya BIMP-EAGA, visi dan misi serta manfaat dibentuknya BIMP-EAGA, dan negara-negara yang ikut dalam forum kerjasama ini.

**BAB III** : akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam dan kebijakan ekonomi negara-negara BIMP-EAGA,. Yang akan dibagi lagi kedalam dua sub bab. Sub bab pertama akan dijelaskan kebijakan ekonomi negara anggota BIMP-EAGA, sub bab kedua menjelaskan tentang potensi sumber daya alam masing-masing negara.

**BAB IV** : memaparkan peluang dan tantangan Kalimantan Timur dalam forum kerjasama ekonomi regional BIMP-EAGA.

**BAB V** : berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dijabarkan